

SIDANG PEMBAHASAN LKPJ SABU RAIJUA



Rapat Paripurna Tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sabu Raijua TA. 2017 kepada DPRD berlangsung Jumat, 20 April 2018 di Menia.Plt. Bupati Sabu Raijua, Nikodemus N. Rih Heke, M.Si dalam sambutannya mengatakan dalam kehidupan pemerintah yang pro rakyat, ikhtiar untuk menciptakan kesejahteraan rakyat merupakan kewajiban pemerintah melalui kebijakan dan program kegiatan yang harus diterima rakyat sebagai pemetik kebijakan.Laporan PertanggungJawaban akhir TA. 2017 atas penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai cerminan kinerja kepala daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran diukur berdasarkan tolak ukur kebijakan umum APBD tahun anggaran bersangkutan yang disepakati bersama DPRD.Lebih lanjut, Plt. Bupati menjelaskan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA. 2017 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan penyusunan anggaran berlandaskan pada efisiensi, efektifitas tepat waktu pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.Sementara itu ketua DPRD Paulus Rabe Tuka dalam kesempatan tersebut menyampaikan pemerintah daerah adalah pihak yang bertindak merumuskan kebijakan mengelola program dan kegiatan pembangunan guna menjawab kebutuhan dan permasalahan rakyat, dan mempertanggungjawabkannya kepada DPRD dalam bentuk LKPJ tahunan.Lebih jauh menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat pogres report. Mencermati laporan pertanggungjawaban APBD tersebut, dan khusus pada penerimaan PAD patut diberi apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemda. Namun dirinya mengharapkan khusus untuk belanja modal yang tidak terserap supaya menjadi catatan khusus agar diperbaiki tahun ini.Akhirnya menutup sambutannya Ketua DPRD mengaharapkan kepada seluruh jajaran pemerintahan agar lebih serius untuk segera menyelesaikan permasalahan yang masih menghambat pelaksanaan pembangunan di Sabu Raijua. (Kominfo / Humas)